TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN

Fransiska Novita Eleanora
Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

ABSTRACT

Visum et repertum is an equipment of valid evidence in court session and confessed in code/law and has permanent legal force, based on rule of section 186 KUHP. The purpose of this paper is to explain and to give more detail about the Visum et repertum which can be made as a means of valid evidence to determine death causes. The method used is bibliography study. The result shows that not only the visum et repertum as a means of evidence, but also the verification in the court will be believed by the confidence of judge for knowing that crime already happened as an effort in looking for the fact.

PENDAHULUAN

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, dengan adanya ketentuan perundang-undangan perkara pidana, maka penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

Alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 183 KUHP, menyatakan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya".

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. KUHP bahkan memberikan perhatian utama terhadap perlindungan "jiwa" dan "badan" sehingga kedudukan seorang ahli sangat diperlukan dalam penanganan korban kejahatan, karena bantuan profesi kedokteran sangat menentukan suatu kebenaran yang berhubungan dengan kejahatan dan khususnya bantuan dari mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus.

Dalam kaitannya dengan visum et repertum sebagai alat bukti, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana visum et repertum dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian di persidangan.

PEMBAHASAN

Pengertian visum et repertum (VeR)

Visum et repertum disingkat VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. Dasar hukum dari visum et repertum ialah

Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 350, disebutkan bahwa: **Pasal 1, Visa reperta**, seorang dokter yang dibuat baik atas sumpah jabatannya yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Negeri Belanda atau Indonesia maupun atas sumpah istimewa seperti tercantum dalam **Pasal 2**, mempunyai daya bukti syah dalam perkara pidana selama **visa reperta** tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda yang diperiksa.

Jenis dan bentuk visum et repertum

1. Jenis-jenis Visum et Repertum

Secara umum dapat disebutkan bahwa Visum et Repertum memuat keterangan mengenai orang hidup ataupun mati, dan semua dokter dianggap memiliki kemampuan untuk menyusun visum et repertum dalam bentuk apapun.

a. Visum et Repertum perlukan (termasuk keracunan); Digunakan untuk mengetahui penyebab luka, terhadap pasien dibuat catatan medik atas semua pemeriksaan, yang nantinya akan digunakan untuk pemeriksaan atau pengobatan.

b. Visum et Repertum jenazah; Diperlukan untuk melihat sebab-sebab kematian dan juga membuktikan apakah sudah ada tanda-tanda perawatan atau belum. Pada surat permintaan visum et repertum harus jelas tertulis jenis pemeriksaan yang diminta, apakah pemeriksaan luar jenazah ataukah pemeriksaan autopsi (bedah mayat). Hal ini diatur dalam pasal 133 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

c. Visum et Repertum Psikiatri

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana." Visum et repertum psikiatri ini diperuntukkan bagi tersangka atau pelaku tindak pidana dengan menguraikan tentang segi kejiwaan manusia, bukan fisik atau raga manusia.

2. Bentuk visum et repertum

Membuat Visum et Repertum pada dasarnya adalah menyalahi kewajiban menyimpan rahasia pekerjaan seperti yang ditentukan oleh pasal 322 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu :

a. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang ia wajib menyimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu. Tapi perbuatan visum et repertum ini dapat dibenarkan dengan adanya pasal 50 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang berbunyi : "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana." Dengan demikian **Isi/bentuk visum et repertum** adalah sebagai berikut:

a. Pendahuluan, memuat identitas dokter pemeriksa pembuat, memuat identitas, saat dilakukannya pemeriksaan dan identitas barang bukti (manusia), sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permintaan Visum et Repertum dari pihak penyidik.

b. Pemberitaan atau hasil pemeriksaan, memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti (manusia) yang diperiksa oleh dokter, dengan atau tanpa pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan laboratorium).

c. Kesimpulan, memuat inti sari dari berbagai pemberitaan atau hasil pemeriksaan, yang disertai dengan pendapat dokter yang bersangkutan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.

d. Penutup, memuat pernyataan bahwa Visum et Repertum dibuat atas sumpah jabatan dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dan memuat tanda tangan dokter yang memeriksa. Pasal 120 ayat (1) KUHP menentukan bahwa seorang ahli (termasuk dokter) wajib memberi pendapatnya kepada penyidik.

Visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan

Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1 disebutkan bahwa : "Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa."

Seorang penyidik dapat meminta bantuan dokter khususnya sehubungan dengan permintaan keterangan ahli/visum et repertum. Seorang dokter dapat dimintai bantuannya dalam hal: (a) Pemeriksaan pertama di tempat kejadian kejahatan, (b) Pemeriksaan pada korban yang masih hidup (antara lain luka), (c) Pemeriksaan pada korban yang mati (otopsi), (d) Pemeriksaan pada korban yang telah dikubur (penggalian mayat), (e) Pemeriksaan barang bukti, (f) Memberi kesaksian pada sidang pengadilan selaku saksi ahli.

Bantuan seorang ahli diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan. Bantuan ini mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksa. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Indonesia menganut prinsip pembuktian berdasarkan undang-undang secara **negative (negatief wettelijk)**. Dalam prinsip ini, hakim baru boleh menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan, apabila telah memenuhi alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, ditambah dengan

keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.

Pengertian keterangan ahli dijelaskan dalam **Pasal 1 angka 28 KUHAP** : "keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."

Pasal 186 KUHAP ditegaskan tentang kekuatan bukti dari keterangan ahli yaitu " keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". Jadi, keterangan ahli baru memiliki kekuatan bukti sebagai alat bukti apabila keterangan itu dinyatakan dipemeriksaan sidang pengadilan. Siapa saja yang dimaksud dengan ahli, tidak harus diartikan sebagai seseorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang sudah memiliki ijazah tertentu. Menurut hukum acara pidana, setiap orang dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman khusus mengenai sesuatu hal.

Keterangan ahli dapat diberikan:

1. Pada tahap pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yaitu sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan: (a) keterangan yang diberikan secara tertulis dalam bentuk laporan, (b) keterangan ahli yang diberikan secara lisan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ahli.
2. Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Bentuk keterangan ahli yang diberikan dalam laporan atau visum et repertum, dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan, dan yang diberikan secara lisan di depan persidangan.

a. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau visum et repertum akan mempunyai kekuatan bukti sebagai alat bukti surat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa surat dibuat dan dikuatkan dengan sumpah jabatan yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya akan sesuatu keadaan.

b. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk lisan dalam pemeriksaan penyidikan dan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikuatkan dalam sumpah, mempunyai nilai kekuatan bukti sebagai keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam **pasal 186 KUHAP alinea pertama** : "keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut

umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan".

c. Alat bukti keterangan ahli yang diberikan secara lisan dan langsung kepada hakim dipersidangan pengadilan adalah memiliki kekuatan bukti mutlak yang dimaksud **pasal 186 KUHAP** alinea kedua : "jika keterangan ahli tidak diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan diminta untuk memberi keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan".

Pembuktian dapat diartikan **secara**:

1. **Arti luas**, mengandung dua bagian sebagai berikut:

Pertama, kegiatan persidangan pengadilan dalam usaha mendapatkan fakta-fakta hukum dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Apabila fakta-fakta tersebut dirangkai menurut akal dan menggambarkan peristiwa sebenarnya yang dalam surat dakwaan telah dikemukakan perkiraan atau dugaannya. **Kedua**, kegiatan yang dalam persidangan pengadilan yang menurut undang-undang membahas dan menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang didapat dari persidangan dengan cara-cara tertentu. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan alat-alat bukti, apakah benar atau tidak menurut akal telah terjadi tindak pidana yang didakwakan.

2. Pembuktian dalam arti sempit, dapat dilihat dari 3 (tiga) pihak masing-masing

a. Pihak JPU (Jaksa Penuntut Umum)

Pembuktian merupakan kegiatan membuktikan yang dilakukan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan menggunakan alat-alat bukti dan dengan cara-cara tertentu yang menurut undang-undang yang diarahkan pada :

1) Pada terbuktinya tindak pidana yang didakwakan tersebut.

2) Ditujukan untuk membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan terdakwa telah bersalah melakukannya dimana Jaksa penuntut umum memegang kewajiban untuk membuktikan menurut sistem pembebanan pembuktian dalam hukum acara pidana.

b. Pihak Penasehat Hukum

Dari sudut penasehat hukum, pengertian pembuktian adalah kegiatan membuktikan dengan menggunakan

alat-alat bukti dan cara-cara tertentu menurut undang-undang yang diarahkan pada :

1) Tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan
2) Tidak terbentuknya keyakinan hakim bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa yang melakukannya
3) Diarahkan pada hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan.

4) Hal-hal yang meringankan kesalahan dan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa, kegiatan pembuktian ini diwujudkan dalam nota pembelaan dan duplik.

2. Pembuktian dari sudut Majelis Hakim

Dengan menggunakan alat-alat bukti maka dapat dilakukan penganalisaan terhadap fakta-fakta melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam usaha menarik keyakinannya tentang terbukti tidaknya
a. tindak pidana yang didakwakan
b. terdakwa melakukan atau tidak melakukan, kegiatan pembuktian oleh majelis hakim ini diwujudkan dalam vonis yang dibacakan dimuka persidangan.

Menurut Van Bemmelen maksud dari pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran hakim dari:
1. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi.

2. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa ini telah terjadi, oleh sebab itu pembuktian terdiri dari (a) Menunjuk peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indra.(b) Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima, (c) Menggunakan logis.

Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya". Penjelasan Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatakan ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi dalam pasal ini diperlukan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang adalah: (a) Adanya dua bukti yang sah, (b) Keyakinan, (c) bahwa tindak pidana tersebut

benar terjadi, (d) bahwa terdakwa yang bersalah berbuat. Seperti yang telah dirumuskan dalam pasal 341 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan apabila semua unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi maka pelaku dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan rumusan pasal tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. *Visum et repertum* dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian persidangan bila dapat menjabarkan kejadian yang sebenarnya, yang dibuat oleh dokter forensik serta dengan sumpah jabatan.
2. Sesuai dengan Pasal 184 dan Pasal 187 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sehingga *visum et repertum* sebagai alat bukti sah menurut Undang-Undang dan termasuk dalam kategori alat bukti surat.
3. Selain *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah, diperlukan juga pembuktian dalam arti sempit, pembuktian dari sudut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Penasehat hukum, dan pihak majelis hukum, yang semuanya sangat berkaitan untuk melihat apakah sipelaku dapat dipersalahkan dalam melakukan tindak pidana.

Saran-saran

1. Mengingat pentingnya *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian persidangan, maka aturan yang berkenaan dengan *visum et repertum* tidak hanya diatur dalam staatsblad 350 Tahun 1937 saja, melainkan juga diatur dalam RUU KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sehingga menjadi aturan yang jelas.
2. Apabila *visum et repertum* itu telah diatur secara jelas, diharapkan dapat berperan membantu penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana khususnya dalam hal menentukan sebab-sebab kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Mun'im, *Pedoman ilmu kedokteran forensik*, Binarupa, aksara, Jakarta, 1997
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Cheni Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006

Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Soerjono Soekanto, *Visum et Repertum teknik penyusunan dan pemeriam*, Penerbit IND-IHLL-CO, Jakarta, 1987.

Waliyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2007.

www.google.com

PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL AKAN MENDORONG KEMAJUAN BANGSA